



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon nanas, Jakarta Timur 13410
Telepon. (021) 8580101/ (021) 8580103 Website: www.menlh.go.id

22 November 2024

Nomor : S.03/A-E/E/PLA.S.2/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di

Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
 - a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16**"*
 - b. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau; gubernur, untuk ... dst**"*
 - c. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik**"*

2. Memperhatikan :
 - a. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 600-4/0409/DLHK tanggal 25 September 2024 perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029.
 - b. Laporan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029, diterima lengkap tanggal 14 Oktober 2024; dan
 - c. Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 bulan 29 Agustus 2024.
 - d. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan dalam Rangka Asistensi Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor BA.43/PDLKWS/ KLHS/8/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
3. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
 - i. Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029;
 - ii. Laporan KLHS (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - iii. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
 - b. Telaahan terhadap KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Berita Acara Nomor BA.43/PDLKWS/KLHS/8/2024 tanggal 15 Agustus 2024 menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
 - c. Atas dasar demikian, dinyatakan bahwa KLHS untuk RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029, diberikan **persetujuan validasi, dengan rincian sebagaimana terlampir** dan rekomendasi sebagai berikut :
4. Adapun Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :
 1. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Menindaklanjuti hasil KLHS apabila pada proses penyusunan KLHS terdapat keterbatasan metode ilmiah, situasi sosial dan politik yang dinamis.
 3. Melaksanakan dan memprioritaskan skenario dengan upaya tambahan untuk indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan namun belum tercapai sejumlah 44 indikator (24%), serta indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sejumlah 4 indikator (2%).

4. Melaksanakan pemenuhan data untuk setiap indikator TPB yang tidak ada data yaitu sejumlah 41 indikator (22%).
5. Memastikan bahwa seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arah kebijakan dan arahan program.
6. Menjadikan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029 sebagai rujukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Menyampaikan kepada publik tentang KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
Plt. Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 196810111994031001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;

Lampiran surat

Nomor : S.03 / A-E/E/PLA.S.2/11/2024

Tanggal : 22 November 2024

Rincian Hasil Telaahan :

- a. KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
- b. Sistematika Laporan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 telah sesuai dengan Permendagri No 07 Tahun 2018 dan kaidah-kaidah PP No 46 Tahun 2016;
- c. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan bahwa terdapat 96 indikator (52%) dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), 44 indikator (24%) dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 4 indikator (2%) dengan kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB), dan 41 indikator (22%) dengan kategori tidak atau belum ada data (N/A).
- d. Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesis isu antara isu-isu strategis Lingkungan hidup, isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), konsultasi publik dan isu-isu strategis kerangka kebijakan terkait yaitu Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun 2022, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Dokumen KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Dokumen KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Dokumen KLHS RTRW Tahun 2024-2044 dan Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045. Rumusan Isu Paling Strategis yaitu :
 1. Penurunan kuantitas dan kualitas air
 2. Kerusakan lahan
 3. Ketahanan pangan yang rendah
 4. Transformasi ekonomi yang belum optimal untuk keberlanjutan lingkungan dan penghidupan masyarakat
 5. Pengelolaan sampah yang belum optimal
 6. Emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim
 7. Kerusakan pesisir dan laut
 8. Reklamasi lahan bekas tambang yang belum optimal.

e. Analisis Capaian TPB terhadap Kondisi Lingkungan Hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melakukan capaian TPB pada dasarnya telah dilakukan berbagai kajian sebagai berikut :

(1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut :

a) Ketersediaan air sebesar 17.546.708.578 m³/tahun sementara pemanfaatan air total 5.344.062.769 m³/tahun. Jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah adalah 15.743.672 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2022 yaitu 1.491.990 jiwa, maka status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni belum terlampaui.

b) Wilayah administrasi dengan status terlampaui terbesar berada di Kabupaten Belitung Timur seluas 33.507 ha, Kabupaten Bangka Barat seluas 25.644 ha dan Kabupaten Bangka seluas 25.251 ha, hal disebabkan oleh tingginya kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan dengan perkebunan dan tanaman homogen.

(2) Dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut :

a) Daerah rawan bencana yaitu banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, angin kencang, bencana petir dan kekeringan.

b) Bahaya banjir kategori tinggi seluas 386.367 ha, wilayah dengan bahaya banjir kategori tinggi terluas adalah Kabupaten Bangka Selatan seluas 99.848 ha.

c) Bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi seluas 690.596 ha, wilayah dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi terluas adalah Kabupaten Bangka Selatan seluas 243.199 ha.

(3) Kinerja jasa ekosistem dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

a) Jasa lingkungan sebagian besar merupakan jasa lingkungan rendah dan sedang. Jasa lingkungan rendah pada jasa lingkungan penyedia air dan pendukung habitat dan kehati sementara itu kelas sedang pada jasa lingkungan penyedia pangan dan pengatur air.

b) Jasa lingkungan penyedia pangan didominasi oleh kelas sedang seluas 676.626 ha (41%) dan tinggi seluas 439.278 ha (26%).

c) Jasa lingkungan penyedia air didominasi oleh kelas sangat tinggi seluas 628.862 ha (38%) dan sedang seluas 352.289 ha (21%).

d) Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir sebagian besar kelas sedang seluas dengan 618.968 ha (38%).

- (4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dianalisis dengan hasil sebagai berikut :
- a) Pada tahun 2029, neraca air menurun sebanyak 213.816.873,78 m³ dari tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2045, neraca air menurun sebanyak 312.428.089,02 m³ dari tahun sebelumnya.
 - b) Pada tahun 2029 pemanfaatan air total sebesar 6.575.373.639,54 m³/tahun dengan komposisi 98,88% untuk aktivitas ekonomi (non-domestik) dan 1,12% untuk aktivitas domestik penduduk.
 - c) Luas IUP di darat sebesar 328.909 ha dan di laut seluas 516.532 ha.
- (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim diperoleh analisis sebagai berikut :
- a) Kerentanan iklim sebagian besar kategori sedang yaitu seluas 927.633 ha (56%).
 - b) Jasa lingkungan pengaturan iklim sebagian besar kelas sedang dengan luas 609.881 ha (37%).
 - c) Jasa lingkungan pengaturan iklim kelas tinggi seluas 412.405 ha (25%) dan sangat tinggi seluas 67.854 ha (4%).
- (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperoleh analisis sebagai berikut :
- a) Tipe vegetasi alami sebagian besar berupa vegetasi hutan kerangas pamah seluas 936.219 ha, terdapat sekitar 65.401 ha hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang yaitu seluas 17.745 ha.
 - b) Beberapa area daratan adalah habitat tempat berhenti (*stop over habitat*) bagi beberapa jenis burung migran.
 - c) Jasa lingkungan pendukung habitat dan kehati sebagian besar rendah.
- f. Alternatif Skenario dan Rekomendasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan 2 (dua) alternatif skenario, yaitu alternatif skenario tanpa upaya tambahan sejumlah 81 indikator dan alternatif skenario dengan upaya tambahan sejumlah 104 indikator. Alternatif Skenario dan Rekomendasi yang dilaksanakan dalam bentuk pilihan program dan kegiatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:
- 1 Penurunan kuantitas dan kualitas air :
 - Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Program Kawasan Permukiman
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Program Penanganan Bencana

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - Program Pengelolaan Hutan
- 2 Kerusakan lahan :
- Program Pengelolaan Hutan
 - Program Penanggulangan Bencana Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Program Perencanaan Hutan
- 3 Ketahanan pangan yang rendah :
- Program Penanggulangan Bencana
 - Program Penanganan Bencana
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Ketahanan Pangan
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - Program Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Penyediaan dan Prasarana Pertanian
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Kesejahteraan Rakyat
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4 Transformasi ekonomi yang belum optimal untuk keberlanjutan lingkungan dan penghidupan masyarakat :
- Program Kesejahteraan Rakyat

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemberantasan Buta Aksara
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pengendalian Penduduk
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Program Minyak dan Gas Bumi
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pemberdayaan UMKM
- Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- Program Hubungan Industrial

- Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - Program Perlindungan Khusus Anak
 - Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Program Penataan Organisasi
 - Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - Program Pergarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Pengendalian Penduduk
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 5 Pengelolaan sampah yang belum optimal :
- Program Kawasan Permukiman
 - Program Pengelolaan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Program Pengelolaan Persampahan
- 6 Emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim :
- Program Penanggulangan Bencana Upaya Kesehatan Masyarakat

- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Program Minyak dan Gas Bumi
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Kehutanan

7 Kerusakan pesisir dan laut :

- Program Pengelolaan Pelayaran
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

8 Reklamasi lahan bekas tambang yang belum optimal :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Program Pengelolaan Hutan

Jakarta, 22 November 2024
 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
 Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Sasmita Nugroho, S.E.
 NIP. 19690705 199603 1 001

Lampiran Surat

Nomor : 5.03/A-E/E/PLA.5.2/11/2024

Tanggal : 22 November 2024

Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029

Nama KLHS	KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029
K/L Penanggung Jawab	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Pelaksanaan	2024

Keterangan penilaian:

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

Penilaian 1: Kelengkapan dokumen		
Kriteria Penilaian	Penilaian	Keterangan
Surat Permohonan	TS	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	TS	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	TS	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	TS	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	TS	-

Catatan :

Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016.

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas		
Kriteria	Validasi	Keterangan
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:	Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan	

1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	-
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	-
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Sudah	-

Catatan :

- Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 telah disampaikan pada penjaminan kualitas KLHS hasil penilaian mandiri bahwa KLHS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:			
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Sudah	
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Ada catatan	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas

Catatan :

- Hasil penjaminan kualitas agar ditambahkan catatan dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan dari KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang perlu menjadi pertimbangan.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas		
Kriteria	Pemenuhan	Keterangan
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :		
1. Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Ada catatan	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2. Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Ada catatan	Jenis KLHS ini adalah <i>ex-ante</i>

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus		
Kriteria	Pemenuhan	Keterangan
1. Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Sudah	
2. Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Sudah	

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi		
Pokok-pokok Rekomendasi	Pemenuhan	Keterangan
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?		
1. Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	Ada catatan	Tidak eksplisit dijelaskan
2. Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	Ada catatan	Tidak eksplisit dijelaskan
3. Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Ada catatan	Tidak eksplisit dijelaskan
4. Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Ada catatan	Tidak eksplisit dijelaskan

Jakarta, 22 November 2024

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor



Sasmita Nugroho, S.E.
NIP. 19690705 199603 1 001